

ABSTRAK

Iqbal Vernando, No. BP 0910842009, Pemetaan Kebijakan Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2012, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Padang, 2013. Dibimbing oleh: Rozidateno P. Hanida, S.IP, M.PA dan Hendri Koeswara S.IP, M.Soc.Sc. Skripsi ini terdiri dari 212 halaman dengan referensi 14 Buku Teori, 4 Buku Metode, 5 Jurnal, 2 Peraturan Perundang-undangan, 36 Peraturan Daerah, 1 Peraturan DPRD, 1 Laporan Penelitian, 5 Jurnal dan Artikel serta 14 Website Internet dan Koran.

Penelitian ini mendeskripsikan tentang Peraturan Daerah yang telah ditetapkan Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2012. Kajian ini dilatar belakangi oleh peningkatan kuantitas Peraturan Daerah yang ditetapkan Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat dari Tahun 2010, Tahun 2011 hingga Tahun 2012 yang disertai dengan peningkatan jumlah penghargaan yang diterima pemerintah provinsi sampai Tahun 2012. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Penelitian ini menggunakan teori kebijakan publik dan model pengambilan keputusan kebijakan publik yang dikemukakan Michael Howlett and Ramesh.

Deskripsi dan analisis terhadap Perda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2012 menghasilkan pemetaan kebijakan yang terkategori kedalam 3 (tiga) model pengambilan keputusan kebijakan publik. Terdapat beberapa perda yang termasuk kategori model rasional, model inkremental dan model *garbage can*. Dari hasil Pemetaan Kebijakan Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2012, selanjutnya dilihat tren perda berdasarkan beberapa sektor kebijakan yang dikorelasikan dengan penghargaan dan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015.

Tren perda yang dihasilkan adalah kebijakan pada sektor lain-lain yang terdiri dari 13 (tiga belas) perda yang dihubungkan dengan penghargaan yang diterima Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2012 dan RPJMD Tahun 2010-2015. Hasilnya adalah terdapat hubungan antara tren perda yang ditetapkan Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2012 dengan penghargaan dan RPJMD Tahun 2010-2015. Meskipun hubungan tersebut tidak meliputi keseluruhan perda yang terdapat dalam tren sektor kebijakan lain-lain. Dengan demikian perda yang ditetapkan Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2012 berhubungan dengan penghargaan dan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015.

Kata kunci: peraturan daerah, model rasional, model inkremental dan model *garbage can*, penghargaan.

ABSTRACT

Vernando Iqbal, Registered Number 0910842009, Mapping the West Sumatra Provincial Government Policy in 2010-2012 Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Sciences, Andalas University, Padang, 2013. Supervised by: Rozidateno P. Hanida, S.IP, M.PA and Hendri Koeswara S.IP, M.Soc.Sc. This thesis consists of 212 pages with 14 references theory books, 4 research method books, 5 journals, 2 regulation, 36 local regulations, 1 Council Decision, 1 research report , 5 journals and articles, 14 internet websites and newspapers.

This study describes the predefined Local Regulation Government of West Sumatra in 2010 until 2012. The study was motivated by the increase in the quantity of local regulations specified area of West Sumatra province of in 2010 until 2012 which is accompanied by an increase in the number of awards received by the provincial government until 2012. The approach used in this study is qualitative descriptive approach. This study uses the theory of public policy and public policy decision-making model by Michael Howlett and Ramesh.

Description and analysis of the regulation of West Sumatra 2010-2012 resulted in mapping policies categorized into three public policy decision-making models. There are some regulations that include the model category of rational , incremental model and garbage can models. Mapping of the results of West Sumatra Provincial Government Policy Year 2010-2012 , further regulations trend seen by some policy sectors are correlated with awards and RPJMD of West Sumatra 2010-2015.

The resulting trend is the policy regulations in other sectors consisting of 13 (thirteen) regulations associated with the awards received by the Government of West Sumatra RPJMD Years 2010-2012 and 2010-2015. The result is that there is a relationship between trends regulations set out the Government of West Sumatra 2010-2012 with awards and RPJMD Year 2010-2015. Although the relationship is not covering the whole trend regulations contained in other policy sectors. Thus the regulations set out the Government of West Sumatra 2010-2012 relating to the award and RPJMD of West Sumatra 2010-2015.

Keywords : local regulations, rational model, incremental model and garbage can models, awards.